

TAJUK RENCANA

Menyoal Keputusan PTUN

LANGKAH mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang menggugat keabsahan Suhartoyo sebagai Ketua MK dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam putusannya, PTUN menyatakan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah sehingga harus dicabut. Majelis hakim PTUN Jakarta mencabut keputusan MK No. 17 Tahun 2023 tertanggal 17 November 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Hal menarik dari putusan tersebut, PTUN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk dijadikan kembali sebagai Ketua MK. Namun, dalam putusannya hakim PTUN mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya. Atas putusan PTUN Jakarta, delapan hakim MK mengajukan banding.

Putusan PTUN Jakarta ini mengundang kontroversi di masyarakat, terutama di kalangan ahli hukum. Putusan PTUN sama saja mengabaikan putusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Satpa Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan.

Ini terkait dengan keluarnya putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Keputusan nomor 90 tersebut telah memuluskan langkah putra Presiden Jokowi yang merupakan keponakan Anwar

Usman, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski demikian, kita tetap menghormati putusan PTUN Jakarta sebagai sebuah produk hukum. Bahwa putusan itu tidak memuaskan para pihak, khususnya termohon, sudah ada mekanisme untuk mengoreksinya, yakni melalui pengajuan banding. Kita juga menghormati delapan hakim MK, minus Anwar Usman untuk mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta.

Kita melihat agak janggal ketika putusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang bersifat internal dapat digugat melalui PTUN dan dikabulkan. Kalau dicermati, mekanisme atau tata cara pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua MK tidak diatur dalam UU MK. UU tersebut hanya mengatur mekanisme pengangkatan hakim MK. Dengan begitu, dalam praktiknya, pengangkatan Ketua dan Wakil MK dipilih dan ditetapkan secara internal, tidak pula melalui Keppres.

Hal itulah yang menimbulkan dilema, dan muncul pendapat bahwa pengangkatan Ketua MK bukan merupakan objek sengketa di PTUN, karena tidak diterbitkan oleh pejabat administratif. Prinsipnya, tak ada lembaga di luar MK, termasuk PTUN, yang dapat mencampuri urusan internal MK.

Apakah dengan demikian MK tak perlu mematuhi putusan PTUN? Mantan Ketua Majelis Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie berpendapat, MK bisa menesampingkan putusan PTUN. Artinya, tak perlu banding maupun kasasi. Menurut Jimly, MK dapat menetapkan kembali Suhartoyo sebagai Ketua MK. Namun, hemat kita, sebagai sebuah preseden, lebih baik MK melalui delapan hakimnya mengajukan banding, sekaligus ini sebagai pembelajaran dalam berkeadilan. □

PESAN MORAL PROF HAEDAR UNTUK PEMIMPIN BANGSA

Indonesia Hampir Kehilangan Nyawa

Arif Jamali Muis

MENJELANG peringatan HUT ke-79 hari kemerdekaan RI, Prof Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga Guru Bangsa menyampaikan pidatonya dengan judul 'Indonesia Beryawa Menuju Indonesia Raya'. Pidato tersebut jika kita cermati mendalam sesungguhnya menggambarkan kegelisahan sang guru Bangsa terhadap kondisi dan fenomena bangsa ini.

Saya kutipkan satu bait pidatonya yang sangat menggetarkan dan menyentuhkan sanubari bagi yang mendengarkan "Jangan biarkan Indonesia saat ini nestapa, apalagi mati suri karena raganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara salah urus, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah wujud dari pengkhianatan atas jiwa kemerdekaan Indonesia, yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa para pejuang dan pendiri Indonesia. Kemosotan moral dan segala tindakan buruk dalam berbangsa dan bernegara merupakan bentuk perusakan jiwa Indonesia."

Lebih lanjut sang guru bangsa berharap nyawa Indonesia itu harus dihidupkan dan menjadi tanggung jawab para pemimpin bangsa. 'Jadilah para pemimpin Indonesia yang berjiwa, berpikiran, bersikap dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, agama dan kebudayaan serta sejarah Indonesia yang sarat makna. Jadilah para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dinasti dan golongan sendiri.'

Kondisi Indonesia saat ini

Pesan moral Prof Haedar di atas tentu berangkat dari refleksi terhadap kondisi bangsa saat ini, bukan hanya sekadar imbuhan moral belaka yang berangkat dari teori-teori tentang kebaikan. Pesan moral itu tidak berangkat dari ruang hampa tetapi berangkat dari kenyataan yang terjadi di bangsa ini. Artinya bangsa ini dalam kondisi yang kritis, berada pada posisi koma yang hampir kehilangan nyawanya.

Kesadaran bahwa Indonesia hampir kehilangan nyawa ini sangat penting, makna kehilangan nyawa bukan berarti Indonesia bubar, tetapi adanya Indonesia sudah tidak bermakna lagi bagi rakyat dan sudah melenceng jauh dari tujuan didirikan bangsa ini untuk mensejahterakan lahir batin rakyat Indonesia. Nyawa Indonesia itu adalah kelima sila dalam Pancasila, hampir kehilangan nyawa berarti hampir kelima



KR-JOKO SANTOSO

sila dalam Pancasila tersebut tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh elite startegis bangsa ini.

Pancasila Nyawa Indonesia

Ketuhanan Yang Maha Esa, menjaga para pemimpin bangsa agar bertindak sesuai norma-norma agama dan muncul kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan sang Pencipta.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut para pemimpin untuk memandang manusia dalam kesetaraan dan menghindari perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Persatuan Indonesia, harus menjadi arah bagi setiap kebijakan bahkan perilaku para elite bangsa. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan perpecahan dan polarisasi di tengah masyarakat 'haram' dilakukan oleh para politisi

dan elite bangsa ini.

"Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" menjadi landasan bagi para pemimpin bangsa untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan, hikmah dan kebijaksanaan adalah sikap kedewasaan yang harus dimiliki ketika bermusyawarah dan bernegosiasi.

Dan Tujuan akhirnya adalah, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya dalam pikiran pemimpin bangsa Indonesia adalah kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dan kepentingan kelompok, golongan apalagi keluarga sendiri.

Jadi kegelisahan Prof Haedar Nashir di atas sesungguhnya lonceng tanda bahaya bagi bangsa ini karena kelima nilai-nilai Pancasila tersebut masih jauh panggang dari api.

Momentum Pemerintah Baru

Indonesia dalam kondisi koma, hampir kehilangan nyawanya. Lalu apakah benar akan kehilangan nyawanya? Sangat tergantung dengan pemerintahan baru kita hasil Pemilu 2024 termasuk hasil pilkada yang akan dilaksanakan pada November 2024. Alarm tanda itu sudah dinyalakan oleh Sang Guru Bangsa tinggal tergantung pemerintah baru kita besok Prabowo-Gibran serta hasil pilkada bulan November 2024. Apakah bangsa ini benar-benar kehilangan nyawanya atau bersemi kembali untuk kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Raya? *Wallahua'lam bishshowab.*(*)

*** Arif Jamali Muis, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dan Guru Matematika SMAN 5 Yogyakarta.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklankr@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karanglesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Menguji Janji Jokowi

PIDATO Kenegaraan Presiden Jokowi, 16 Agustus 2024 memaparkan berbagai keberhasilan pemerintahan selama 10 tahun. Sebagai pidato Kenegaraan terakhir, semestinya menjadi pertanggungjawaban Presiden dalam memimpin Indonesia di akhir masa jabatannya. Publik dapat membandingkan janji Jokowi 10 tahun yang lalu dengan pidato Kenegaraan tersebut bukan hanya merupakan peristiwa seremonial tahunan, tapi benar-benar menguji realisasi janji Jokowi.

Dalam dokumen visi, misi dan program aksi yang diberikan kepada KPU saat mendaftar sebagai pasangan Capres dan Cawapres tahun 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki 7 visi dan 9 program aksi yang dikenal dengan Nawacita. Untuk menguji apakah Jokowi mewujudkan visi misi dan program aksinya selama memerintah, kita akan mengujinya dalam 3 program prioritas, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia, penegakan hukum, dan bidang ekonomi.

Capaian Tiga Bidang

Setelah dinyatakan terpilih sebagai Presiden, tanggal 22 Juli 2014 Jokowi dan Jusuf Kalla melakukan pidato kemenangan di atas kapal pinisi Hati Buana Setia'. Pidato tersebut secara simbolik dilakukan di atas kapal sebagai penanda era peradaban baru Indonesia yang berporos pada kekuatan dan kekayaan maritim. Dalam pidatonya Jokowi menyampaikan : 'Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan'.

Jika kita menyimak pidato Kenegaraan Presiden, tidak ada satu katapun dalam pidatonya yang menyebutkan sebagai capaian pembangunan. Melihat lebih dalam lagi perjalanan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, apa yang disebut sebagai poros maritim dunia tidak jelas hasilnya. Hanya ada dua program yang berkaitan dengan maritim selama pemerintahannya, yaitu tol laut dan penenggalan kapal pencuri ikan ketika misterinya dijabat Susi Pujiastuti. Selebihnya, alih-alih Jokowi memben-

Himawan Pambudi

tuk peradaban baru yang berporos maritim, yang dilakukan justru melihat maritim sebagai sumber devisa negara.

Tidak ada peradaban baru maritim sebagaimana yang dijanjikan. Prioritas pembangunan justru mengarah ke pola *continental* (kedaratn) dengan membangun ribuan kilometer jalan, jembatan dan jalan tol seperti yang disampaikan dalam pidatonya. Tidak ada yang salah dengan pembangunan infrastruktur, tetapi seharusnya juga tidak meninggalkan visi misinya ketika mencalonkan sebagai Presiden, karena di situlah rakyat juga meletakkan harapannya dalam memilih pemimpin.

Harapan yang dihimpun Jokowi pada pemilu 2014 adalah tidak berasal dari lingkaran kekuasaan *status quo* yang menghambat penegakan hukum, khususnya penegakan HAM, korupsi dan nepotisme. Jokowi dipandang sebagai representasi harapan menuju *equality before the law*. Dalam beberapa kesempatan kampanye, Jokowi meyakinkan kepada pemilihnya bahwa dia tidak memiliki beban masa lalu dan berjanji untuk menemukannya sendiri, Wiji Thukul.

Dalam pidato Kenegaraannya, Jokowi hanya menyinggung 3 UU, yakni UU KUHP, UU Cipta Kerja, dan UU TPKS. UU KUHP dan UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi banyak pihak. Jokowi sama sekali tidak memaparkan keberhasilannya dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakan HAM.

Jokowi menghindari isu sensitif penegakan hukum dalam Pidatonya, di tengah sorotan penggunaan berbagai instrumen hukum untuk memenuhi ambisi kekuasaannya, seperti putusan MK yang kontroversial, penggunaan aparat penegak hukum dan menekan kawan politiknya.

Jika kita membandingkan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi era Presiden SBY dan Jokowi, nampaknya Jokowi kalah capaian dibandingkan SBY. Pertumbuhan ekonomi Presiden

SBY di akhir pemerintahannya mencapai 5,9%, sementara Jokowi hanya 5,2%. Jokowi justru memamerkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang tidak secara langsung menunjuk pada capaian keberhasilannya di nasional seperti Maluku Utara dan Papua, yang ironisnya kedua gubernurnya tersangkut kasus korupsi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga sama sekali tidak menyinggung beban utang luar negeri. Beban utang yang membengkak berusaha disembunyikan di akhir pemerintahannya untuk menutup celah pertanggungjawaban negatif selama menjadi presiden. Rasio utang pada awal pemerintahan Jokowi sekitar 23%, sedang di akhir pemerintahan naik hampir dua kali lipat, yakni sebesar 39%.

Pidato Kenegaraan Jokowi jika dilihat dari kacamata pertanggungjawaban sebagai Presiden di akhir pemerintahan sangat jauh dari apa yang dijanjikan. Visi, misi dan strategi aksi dalam bidang maritim, hukum dan ekonomi yang tertuang dalam Nawacita tidak terwujud seperti yang dijanjikan pada saat mencalonkan Presiden. Alih-alih berusaha merealisasikan janjinya, Jokowi justru melakukan pembangunan yang tidak ada dalam janjinya, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN). □

*** Himawan Pambudi, pekerja sosial di Yayasan SATUNAMA Yogyakarta.**

Pojok KR

Di Semarang, mahasiswi bunuh diri karena dibuli.
-- Perlu dibentuk satgas antibuli.

KPU kabupaten/kota di DIY telah selesai susun DPS.
-- Tak boleh ada yang tercecceh.

Di Sleman, driver jip wisata konsumsi pil sapi.
-- Bisa pengaruhi kunjungan wisatawan.

Berabe